

Warga Negara dan Ekologi: Studi Kasus Pengembangan Warga Negara Peduli Lingkungan Dalam Komunitas Bandung Berkebun

Wibowo Heru Prasetyo, Dasim Budimansyah

Pendidikan Kewarganegaraan-Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia
Jl. Dr. Setiabudi 229 Bandung 40154, Jawa Barat, Indonesia. E-mail: budimansyah@upi.edu

Abstract: This research aims to describe of the development concerns of citizens towards the environment in Bandung Gardening community who has run a series of pro-environment program. The research method uses a qualitative approach with case study method. The informants are Bandung Berkebun's members and data collection techniques such as interviews, observation, and study the document. The results show that the Bandung Berkebun community with programs such as urban farming, urban farming school, street urban farming and urban campus has succeeded in intensifying agriculture farming town (urban agriculture) as an environmentally conscious lifestyle in Bandung. The success from the standpoint of Citizenship/Civic Education (PKn) is a development virtue of citizens (civic virtue), which became the estuary of learning objectives Civics. The virtue citizen like as participation in environmental conservation is achieved by development of knowledge, skills, ethics, and participation in the environmental field.

Key Words: citizens, urban farming, urban farming school, campus urban farming, bandung berkebun

Abstrak: Penelitian ini bertujuan memberi gambaran tentang pengembangan kepedulian warga negara terhadap lingkungan dalam komunitas Bandung Berkebun yang telah menjalankan serangkaian program pro lingkungan. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Informan penelitian yaitu anggota komunitas Bandung Berkebun dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunitas Bandung Berkebun dengan program-program seperti *urban farming*, *school urban farming*, *street urban farming*, dan *campus urban farming* telah berhasil memasyarakatkan pertanian kota (*urban agriculture*) sebagai gaya hidup peduli lingkungan di Kota Bandung. Keberhasilan tersebut dari sudut pandang Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) merupakan pengembangan kebajikan warga negara (*civic virtue*) yang menjadi muara dari tujuan pembelajaran PKn. Kebajikan warga negara dalam bentuk partisipasi pelestarian lingkungan dicapai berkat pengembangan pengetahuan, keterampilan, etika, dan partisipasi di bidang lingkungan.

Kata kunci: warga negara, urban farming, school urban farming, campus urban farming, bandung berkebun

Warga negara memiliki hak ekologi yang diatur oleh hukum untuk berperan serta dalam upaya pelestarian lingkungan. Hal tersebut sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPH) pasal 5 ayat (3) yang menyatakan bahwa, “*Setiap orang mempunyai hak untuk berperan dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup*”. Kaitan antara

perilaku warga negara dengan krisis ekologi di perkotaan digambarkan oleh Sudarmadi dkk (2011) sebagai penyebab kerusakan lingkungan karena didominasi oleh kurangnya kesadaran warga dalam pengelolaan lingkungan. Artinya, pengelolaan lingkungan selain sebagai hak yang dijamin undang-undang juga memperlihatkan ironi tersendiri sebab aktor utama perusak ekologi juga berasal dari

perilaku warga negara. Bukti-bukti yang tersebar luas di kehidupan kita berupa perilaku merusak lingkungan seperti pembuangan sampah sembarangan, *illegal logging*, sampai pembangunan antara sektor fisik dan upaya pelestarian lingkungan masih menunjukkan kondisi yang timpang. Nagra (2010) bahkan menganggap kerusakan lingkungan di abad sekarang adalah bencana global (*global catastrophe*) dilihat dari luasnya dampak yang ditimbulkan yang melewati sekat-sekat teritorial. Dalam konteks ini, program-program pro lingkungan perlu diisi oleh penguatan moralitas peduli lingkungan sebagai pencegahan kejahatan ekologi (Budimansyah, 2015).

Kota Bandung turut mengalami problem pengelolaan lingkungan hidup. Data dari Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) periode 2014-2018 tercatat persoalan lingkungan di Kota Bandung terutama pada pengelolaan sampah, distribusi air bersih, dan pencemaran sungai. Timbunan sampah di Kota Bandung hingga tahun 2012 baru sekitar 1.000 sampai 1.100 ton atau hanya 69% yang terangkut. Sisa sampah tersebut diperkirakan diolah oleh masyarakat sendiri, dibuang ke sungai, dibuang ke lahan kosong, atau dibiarkan di pinggir jalan. Akses sumber air bersih juga menjadi permasalahan mengingat Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Bandung belum mampu mencukupi kapasitas yang diperlukan warga kota yang semakin bertambah.

Pada tahun 2012 saja, dari total 423.696,481 liter air untuk 564.928 kepala rumah tangga hanya dapat dipenuhi sekitar 141.094 liter. Artinya, hanya sekitar 25% dari total keseluruhan kapasitas ideal yang dapat dipenuhi oleh PDAM Kota Bandung. Selebihnya atau sekitar 75% rumah tangga memenuhi kebutuhan air bersih dari sumur dangkal dan sumur-sumur bor ilegal sehingga mengakibatkan terjadinya penurunan kuantitas air tanah. Pada tahun 2008, terdapat 48 sungai yang hampir seluruhnya tercemar limbah. Dari 48 sungai tersebut terdapat 6 sungai dengan kategori pencemaran berat, yaitu sungai Cikiley, Ciparungpung, Citepus, Cikapundung Kolot, Cikapundung Hilir, dan Cidurian. Limbah-limbah yang mencemari kualitas air sungai sekitar 70% dihasilkan dari limbah rumah tangga dan 30% dari limbah industri seperti tekstil, hotel, restoran, dan rumah sakit (RMPJD Kota Bandung, Tanpa tahun). Kondisi tersebut mendeksripsikan kualitas air sungai dan air tanah di Kota Bandung banyak yang tidak memenuhi standar kelayakan untuk dikonsumsi.

Certoma dan Notteboom (2015) menjelaskan program pelestarian lingkungan oleh pemerintah (*top-down*) hanya bisa berjalan optimal jika didukung oleh pendekatan dari bawah (*bottom-up*) dalam bentuk gerakan sosial. Pendekatan dari gerakan akar rumput (*grass root*) seperti dikemukakan oleh Knap (2013) sebagai proyek kebun masyarakat (*the community gardens*) dan kebun kewirausahaan (*entrepreneurial gardens*) di Eropa memanfaatkan dukungan pemerintah lokal dalam proyek-proyek *urban agriculture*. Stephan Barthel, John Parker, dan Henrik Ernstson (2015) juga menjelaskan keberadaan komunitas berkebun di kota sebagai proses penguatan kelompok sosial dalam politisasi atas lahan di perkotaan. Gerakan ini menjadi penyeimbang bagi kelompok-kelompok kepentingan lain sebagai upaya menjaga ruang terbuka hijau milik publik sebagai wujud dari keadilan sosial yang biasanya berada di balik setiap kebijakan-kebijakan pemerintah. Hasil penelitian terhadap kegiatan *urban domestic gardens* yang dilakukan Loram dkk. (2011) di Kota Edinburg, Belfast, Cardiff, Leicester, dan Oxford pada 267 kebun menunjukkan kegunaan gerakan ini sebagai wahana relaksasi warga, tempat rekreasi, mencukupi logistik pangan, cadangan air tanah, dan tempat bersosialisasi warga. Penelitian dari Specht dkk. (2014) menyebut *urban agriculture* mampu mengurangi dampak emisi karbon, membantu peningkatan daur ulang dari sumber daya air dan sampah. *Urban agriculture* juga menjadi tempat pembelajaran dan membantu menjaga ketahanan pangan serta bermanfaat bagi pengembangan ekonomi lokal dari produk-produk yang dihasilkan dari kebun.

Berbeda dengan beberapa penelitian di atas, penelitian ini mengungkapkan kehadiran Bandung Berkebun yang memberi inisiatif bagi Pemerintah Kota Bandung untuk mengupayakan gerakan pelestarian lingkungan dari peran aktif masyarakat. Bandung Berkebun memang berasal dari gerakan dengan pendekatan dari bawah (*bottom-up*) tetapi tidak pernah menjalankan politisasi lahan lewat gerakan menentang kebijakan Pemerintah Kota. Kedua pihak tersebut justru menjalin kerja sama melalui program-program pro lingkungan bersama-sama. Hal tersebut didasari oleh kesepahaman bahwa tugas pemulihan kondisi lingkungan di Kota Bandung memerlukan kesadaran yang dilaksanakan bersama-sama oleh segenap komponen masyarakat melalui upaya pelestarian lingkungan. Kebutuhan akan peran serta masyarakat sebagai gerakan akar rumput membuat komunitas Bandung Berkebun

mencoba mengambil peran tersebut dengan menyelenggarakan program-program kepedulian lingkungan sejak tahun 2011. Komunitas ini menerapkan konsep 3E, yaitu edukasi, ekologi, dan ekonomi untuk menjadikan kegiatan berkebun di tengah kota sebagai alternatif gaya hidup yang sehat. Program-program yang dilaksanakan bertujuan untuk memberi kemanfaatan bagi pengelolaan lahan Kota Bandung sehingga dapat dimanfaatkan secara optimal untuk memenuhi kebutuhan warga sehingga mendukung daya tahan logistik (pangan) mereka. Pemanfaatan tersebut tidak sebatas pemenuhan kebutuhan pokok berupa sayur tetapi juga penciptaan ruang-ruang publik. Masyarakat Kota Bandung merespon positif program-program dari Bandung Berkebun dan bahkan salah satu program mereka yaitu *urban farming* diadopsi oleh Pemerintah Kota Bandung dalam bentuk program Bandung Kampung Urban Farming (BKUF).

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk memaknai interaksi antara penggerak Bandung Berkebun dengan realitas pengembangan kepedulian warga negara di bidang lingkungan. Kebun Tubagus Ismail dipilih sebagai lokasi penelitian karena merupakan kebun milik komunitas Bandung Berkebun yang di dalamnya sering diselenggarakan berbagai program-program pro lingkungan. Penelitian ini mengambil 9 anggota komunitas Bandung Berkebun sebagai informan dalam proses pengumpulan data. Selama 4 bulan penelitian, peneliti melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap informan dalam semua program-program pro lingkungan terutama yang dilaksanakan di Kebun Tubagus Ismail. Hasil pengumpulan data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan model Milles dan Huberman. Teknis analisis tersebut terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data (Milles dan Huberman, 2012). Data yang berhasil diperoleh kemudian divalidasi menggunakan teknik triangulasi sumber dan teknik pengumpulan data.

HASIL

Komunitas Bandung Berkebun

Komunitas Bandung Berkebun terbentuk pada tahun 2011 sebagai bagian dari komunitas serupa yang memiliki lingkup lebih luas, yaitu Indonesia Berkebun. Kehadiran Indonesia Berkebun sejak 2011 berawal dari ide Ridwan Kamil yang melihat banyak

lahan tidak produktif di kota-kota di Indonesia. Ridwan Kamil mengajak beberapa rekannya untuk mendirikan komunitas bernama Jakarta Berkebun. Pendirian komunitas Jakarta Berkebun pada 2011 inilah yang kemudian menjadi inspirasi bagi munculnya komunitas serupa di berbagai kota, termasuk di Kota Bandung. Berawal dari Kota Jakarta dan Bandung, jejaring Indonesia Berkebun telah ada di 30 kota dan 9 kampus di seluruh Indonesia (Indonesia Berkebun, 2015). Bandung Berkebun memulai tanam perdana di satu kebun sederhana di daerah Sukamulya pada 21 Mei 2011. Tanam perdana ini sekaligus menjadi awal kehadiran komunitas ini kepada masyarakat Kota Bandung. Pada tanam perdana ini mereka mengajak masyarakat sekitar Sukamulya terutama para siswa untuk mencoba berkebun di kota. Keikutsertaan lembaga pendidikan secara langsung dalam kegiatan ini kemudian menginspirasi pembentukan program *school urban farming*. Dari Kebun Sukamulya, Bandung Berkebun memiliki beberapa kebun sendiri atau *homebase* yaitu di Sekolah Alam Bandung dan Kebun Tubagus Ismail yang berdekatan dengan Rumah Sakit Ginjal dan Asrama Pocut Baren. Selama menjalankan kegiatan berkebun, komunitas ini membuat instalasi berkebun dari barang-barang bekas, pembuatan kompos, hingga panen raya yang bisa diikuti oleh masyarakat umum (FAQ BdgBerkebun, 2014).

Komunitas Bandung Berkebun sebagaimana Indonesia Berkebun fokus pada upaya mengajak masyarakat guna menjalani hidup sehat. Dengan prinsip *back to nature dan grow your own food*, komunitas ini meluncurkan program-program pro lingkungan. Prinsip berkebun yang sederhana tertuang ke dalam aktivitas menanam tanaman yang biasa dikonsumsi sehari-hari seperti sayuran dan buah (Indonesia Berkebun, 2015). Pendekatan yang sederhana, mudah dipahami, terbuka buat kalangan manapun (inklusif), dan sosialisasi kegiatan yang memanfaatkan berbagai jejaring sosial serta aktivitas masyarakat Kota Bandung membuat komunitas ini dengan mudah dikenal oleh masyarakat luas. Komunitas Bandung Berkebun memiliki tujuan utama yaitu memanfaatkan lahan-lahan terbengkalai di Kota Bandung untuk menjadi lahan-lahan yang lebih produktif. Dengan kegiatan berkebun yang rutin dilaksanakan setiap akhir pekan bertujuan mengenalkan masyarakat Kota Bandung kepada gaya hidup sehat melalui aktivitas yang menyenangkan, mudah dilakukan, aman, dan bermanfaat. Manfaat dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan selalu bermuara tidak hanya bagi diri

peserta, tetapi bagi warga dan lingkungan Kota Bandung (FAQ BdgBerkebun, 2014). Sasaran kegiatan-kegiatan Bandung Berkebun ialah masyarakat Kota Bandung. Komunitas ini bercita-cita mengajak warga se-Bandung untuk bersama-sama melaksanakan aktivitas berkebun dari lingkungan terdekat, yakni rumah dan kelurahan masing-masing. Semua kegiatan terfokus pada upaya mengajak sebanyak-banyaknya warga Kota Bandung untuk berkebun. Dalam prakteknya, kegiatan komunitas ini selalu diikuti oleh beragam kalangan baik dari lintas usia, ekonomi, bidang keilmuan, agama, ras, dan asal daerah. Komunitas ini menjadi rumah bagi beraneka ragam warga Bandung yang heterogen dengan kepedulian yang sama, yakni menciptakan lingkungan Kota Bandung yang lebih hijau dan sehat (FAQ BdgBerkebun, 2014).

Program Pro Lingkungan

Sejak tahun 2011 Bandung Berkebun telah menyelenggarakan berbagai kegiatan di level lokal maupun internasional. Program utama dalam komunitas ini yaitu program *urban farming*. Program tersebut diikuti tidak hanya oleh anggota komunitas Bandung Berkebun tetapi juga masyarakat secara luas. Program tersebut dilatarbelakangi oleh upaya mencari solusi penanaman kreatif pada lahan di Kota Bandung yang terbatas, sempit, dan sulit untuk ditanam secara konvensional. Bentuk kegiatan yang dilakukan seperti *vertical garden*, hidroponik, aquaponik, maupun penanaman di lahan-lahan kosong yang terbengkalai secara tradisional menginspirasi khalayak umum bahwa berkebun itu mudah dan dapat dilakukan di mana saja. Program ini kemudian menarik perhatian Pemerintah Kota Bandung melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (Disperatapa) untuk mengadopsinya ke dalam program Bandung Kampung Urban Farming (BKUF). Program BKUF pertama dilaksanakan pada 2014 di seluruh wilayah Kota Bandung. Program tersebut juga mengikutsertakan Bandung Berkebun sebagai fasilitator sekaligus relawan kegiatan. Beberapa daerah yang berhasil menerapkan BKUF seperti Kampung Baladewa dan Kampung Kacapiring. Kampung Baladewa dikenal sebagai wilayah yang menerapkan *urban farming* dengan memanfaatkan tutupan Sungai Citepus, sedangkan Kampung Kacapiring telah menggubahkan gang-gang di wilayahnya yang semula gersang menjadi lebih hijau oleh tanaman-tanaman.

Bandung Berkebun juga menjalankan program pro lingkungan bernama *School Urban Farming*. Program ini merupakan gerakan edukasi berkebun kepada kalangan pelajar baik melalui kegiatan *workshop* (dalam bentuk My School Goes Farming, SMACreatiFarming), pemanfaatan lahan tidak produktif di lingkungan sekolah (BdgBerkebun Goes to School), atau di kebun laboratorium Bandung Berkebun (eksplorasi kebun Bandung Berkebun). Dalam dokumen FAQ BdgBerkebun (2014) menyebutkan sekolah-sekolah yang pernah bekerja sama dengan Bandung Berkebun diantaranya TK Bintang Ceria, TK Irahma, SD Semi Palar, SD Pardomuan, SD IT Rabbani, dan SDN Raya Barat. Bandung Berkebun juga kerap mengajak para pelajar di Kota Bandung untuk hadir dalam pelatihan berkebun seperti SMACreatiFarming yang ditujukan untuk menambah keterampilan berkebun mereka sekaligus mendekatkan kepada alam. Bandung Berkebun berkeyakinan bahwa saluran pendidikan merupakan jalan efektif guna mengenalkan perilaku peduli lingkungan kepada masyarakat.

Bandung Berkebun juga mengadakan program *street urban farming* kepada masyarakat Kota Bandung. Gagasan dalam program ini yaitu memanfaatkan antusiasnya warga yang mengikuti kegiatan Car Free Day (CFD) setiap Minggu di Jalan Dago. *Street Urban Farming* dilaksanakan dengan membuat *stand* dan membagikan pamflet kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan beserta program-program lanjutan dalam Bandung Berkebun. Program ini sangat diapresiasi oleh pengunjung sekaligus oleh Walikota Bandung M. Ridwan Kamil. Jalanan di sekitar daerah Tamansari dan Siliwangi pernah menjadi lokasi berkebun di pinggir jalan raya yang diselenggarakan Bandung Berkebun bersama warga. Mereka serentak mengadakan penanaman tanaman di pinggir-pinggir jalan untuk menambah area hijau sekaligus menambah nilai keindahan (estetika) kota. Berdasarkan uraian tersebut maka dampak pelaksanaan program pro lingkungan oleh komunitas Bandung Berkebun disajikan pada Tabel 1.

PEMBAHASAN

Program-program pro lingkungan dalam komunitas sosial seperti Bandung Berkebun telah banyak dilaksanakan di berbagai tempat. Program ini dimaknai sebagai sebagai praktek budidaya, pengolahan, dan pendistribusian bahan pangan di sekitar desa atau kota yang dapat melibatkan aktivitas peternakan, budidaya tanaman pangan, dan hortikultura (Widyawati, 2013). Spiker dan Poulsen

Tabel 1. Program Pro Lingkungan dalam Komunitas Bandung Berkebun

Program	Sasaran	Deskripsi
1. Urban Farming	<ul style="list-style-type: none"> • Anggota Bandung Berkebun • Warga Kota Bandung 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Urban farming</i> difokuskan di Kebun Tubagus Ismail tetapi juga merambah ke wilayah lain seperti daerah Sukamulya, Tamansari, Baladewa, dan Kacapiring • Program ini dapat diikuti oleh siapa saja dan dari kelompok umur berapapun • Program ini dapat menjadi model alternatif pendidikan lingkungan hidup • Beragam latar belakang pegiat menjadikan program ini sebagai wadah pertukaran pengetahuan dan keterampilan • Sosialisasi program berkebun di kota (<i>urban agriculture</i>) mampu meningkatkan pengetahuan dan keterampilan warga guna menciptakan model <i>urban farming</i> sesuai karakteristik wilayah
2. School Urban Farming	<ul style="list-style-type: none"> • Pelajar di Kota Bandung 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>School Urban Farming</i> menargetkan para pelajar dari tingkat TK hingga SMA • Bandung Berkebun bertindak selaku pemateri dalam kegiatan berkebun yang dilaksanakan di sekolah-sekolah • Bandung Berkebun juga mengadakan pelatihan berkebun kepada para pelajar di luar aktivitas sekolah
3. Street Urban Farming	<ul style="list-style-type: none"> • Anggota Bandung Berkebun • Warga Kota Bandung 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Street Urban Farming</i> dilaksanakan setiap Minggu • Program ini berbarengan dengan kegiatan Car Free Day (CFD) yang diikuti masyarakat Kota Bandung • Bandung Berkebun membuat stand di Jalan Dago yang menjadi pusat pelaksanaan CFD • Warga yang antusias ingin ikut serta dalam kegiatan berkebun dipersilakan datang langsung ke Kebun Tubagus Ismail
4. Campus Urban Farming	<ul style="list-style-type: none"> • Mahasiswa di Kota Bandung 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Campus Urban Farming</i> dijalankan di kampus-kampus di Kota Bandung • Peserta dari kalangan mahasiswa dapat mengikuti kegiatan seminar dan pelatihan dari Bandung Berkebun • Beberapa kampus seperti Unpas, Polban, Unpad, dan UPI telah membentuk komunitas berkebun di kampusnya masing-masing

(2014) menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan salah satu bentuk *urban agriculture* yang bertujuan untuk memperoleh profit dari aktivitas berkebun di wilayah urban. Kegiatan *urban farming* dilakukan dengan memanfaatkan ruang-ruang publik sehingga diharapkan mampu meningkatkan aktivitas publik yang positif. Meskipun pada awalnya merupakan gerakan kolektif, namun pada perkembangan berikutnya dapat pula dilakukan oleh pribadi-pribadi di lingkungan rumah mereka atau yang biasa disebut *urban gardening*. Perbedaan yang nampak dari *urban farming* dengan istilah serupa yakni urban gardening ialah pada kegiatan urban gardening akan sulit didapatkan kemanfaatan seperti penguatan interaksi sosial (Amirtamahsebi, 2008). Beberapa negara yang telah menerapkan program ini yaitu Jepang, Kanada, Australia, Amerika Serikat, dan Kuba.

Di Kota Adelaide terdapat Urban Ecology Australia Inc (UEA) yang berdiri pada 1991 sebagai komunitas non profit di bidang lingkungan. UEA memiliki beberapa kegiatan dan tujuan seperti

memberikan informasi dan fasilitas tentang ekologi bersama warga, dosen, wartawan, dan partisipan dari berbagai bidang, menumbuhkan minat terhadap studi dan penelitian tentang evolusi ekologi, dan menyediakan komunitas independen yang berbasis komunitas lokal untuk mengkoordinasi dan melakukan advokasi warga yang berhubungan langsung dengan ekologi, kesehatan, dan aspek sosial yang vital (Downtown, 2009). *Urban farming* di Jepang mengambil fokus pengembangan berkebun di kantor-kantor sehingga disebut sebagai *office garden* sedangkan di Kota Vancouver (Kanada) program ini sangat berkembang dan maju (Widyawati, 2013). Kota San Francisco (Amerika Serikat) dan Havana (Kuba) turut menyelenggarakan perkebunan kota dengan hasil produksi yang dapat menopang ketahanan pangan di kedua negara (SPUR, 2012; FAO, 2014). Kondisi tersebut belum dapat dicapai oleh *urban farming* di beberapa kota di Indonesia termasuk di Kota Bandung. Salah satu penyebab adalah teknik bertanam yang masih didominasi oleh cara bertanam tradisional (Setiawan dan Rami, 2014).

Persoalan tersebut mulai diatasi dengan penggunaan teknik bertanam yang lebih modern seperti *vertical garden*, hidroponik, dan aquaponik yang dapat mengoptimalkan pemakaian lahan di perkotaan. Bandung Berkebun juga menerapkan program *street urban farming* untuk mengkampanyekan kegiatan berkebun di tengah kota sebagai gaya hidup yang sehat dan bermanfaat. Program ini terbukti berhasil mengenalkan *urban farming* sekaligus membedakan dengan program *urban agriculture* atau *urban gardening* di tempat-tempat lain.

Program *school urban farming* juga diterapkan oleh komunitas berkebun di luar negeri dengan menjadikan lembaga pendidikan formal sebagai mitra kegiatan mereka (Nagra, 2010). Hal tersebut sangat penting mengingat belajar melalui praktek seperti dalam program ini dapat menjadi saluran internalisasi nilai-nilai kepedulian lingkungan kepada peserta didik (Sulastri, Budimansyah, dan Sopandi, 2015). Sekolah memang memiliki tugas untuk menciptakan budaya sekolah yang menguatkan karakter peduli lingkungan dengan mengikutsertakan guru, orang tua, dan komunitas dalam masyarakat (Samong, Suryadi, dan Budimansyah, 2015). Oleh sebab itu, program ini sangat tepat jika dianggap sebagai salah satu bentuk pendidikan lingkungan hidup yang terjalin dari interaksi dan koordinasi antara pihak sekolah dengan komunitas peduli lingkungan seperti Bandung Berkebun. Luaran yang diharapkan dari program semacam ini tidak saja bagi pembentukan karakter peduli lingkungan terati juga nilai-nilai mulai seperti kerja sama, tanggung jawab, dan kedisiplinan. Hal serupa yang juga telah diterapkan oleh Bandung Berkebun dengan bekerja sama dengan kampus-kampus di Kota Bandung. Program *campus urban farming* yang menyasar kalangan mahasiswa dapat memberi andil bagi penciptaan komunitas positif yang mewadahi aspirasi dan kreatifitas generasi muda.

Penguatan moral peduli lingkungan dapat dikaitkan dengan status sebagai warga negara untuk mengupayakan keberlangsungan ekosistem di alam (Dobson, 2007). Penguatan moral tersebut ialah dengan penyadaran seseorang atas peran sentral yang dimiliki warga negara tentang kesadaran lingkungan. Peran warga negara tersebut kemudian yang diterjemahkan ke dalam kebiasaan (*habits*) dan perilaku (*behaviours*). McCarney (2012) menjelaskan bahwa kesadaran tersebut berupa partisipasi positif dan kemampuan mengakses informasi tentang kegiatan peduli lingkungan guna

mengupayakan kembalinya daya dukung ekologis bagi kehidupan. Dobson (Tanpa tahun) menawarkan penyelesaian kondisi ekologi yang semakin rusak dengan satu perspektif baru untuk memandang persoalan lingkungan dari posisi sebagai anggota warga negara (*citizen*). Perspektif baru oleh Dobson dinamakan kewarganegaraan ekologi (*ecological citizenship*), yaitu pandangan setiap warga negara bersamaan dengan statusnya sebagai anggota suatu entitas politik bernama negara yang memiliki hak untuk menikmati kehidupan yang sehat dan kewajiban ikut mewujudkannya. Pandangan tersebut merupakan nilai kebajikan berdasar kewarganegaraan yang lebih dari sekedar pandangan yang dibatasi teritorial suatu negara. Dobson beranggapan bahwa kewarganegaraan ekologi turut menjadi satu pandangan yang memicu gerakan kepedulian lingkungan secara privat individu maupun publik. Cara pandang ini juga melebihi pandangan *enviromental citizenship* yang hanya fokus pada persoalan lingkungan tanpa menghitung dampak sosial politik dan ekonomi dari krisis ekologi (Escruihuela, 2008). Hal tersebut disebabkan karena kewarganegaraan ekologi merupakan derivasi dari politik ekologi, atau di sisi lain menganggap kewarganegaraan ekologi sebagai teori tentang kewarganegaraan tersendiri. Pada dua sisi tersebut, perancang dari teori kewarganegaraan melihat adanya perubahan dari relasi antara kewarganegaraan global dan lokal dalam konteks ekologi, dengan menggunakan tanggung jawab sosial dalam wilayah kewarganegaraan sehingga dapat berjalan (Saiz, 2005).

Turner (2001) menjelaskan kewarganegaraan ekologi sebagai ekspresi dari kewajiban warga negara untuk mengembalikan keaslian lingkungan. Dobson sepakat dengan pendapat dari Mark Smith bahwa sudah saatnya ada pandangan tentang '*a new politics of obligation*' atau pandangan politik yang mulai memberikan perhatian pada kewajiban manusia kepada hewan, tumbuh-tumbuhan, gunung, laut, dan semua anggota dalam komunitas. Dobson (2007) mengingatkan bahwa realisasi dari kewarganegaraan ekologi dimulai dari lingkungan rumah sebagai praktek habituasi kepedulian lingkungan bagi internalisasi kebajikan (*virtue*) seperti peduli (*care*) dan keharuan (*compassion*). Pandangan tersebut jika ditinjau dari sudut Pendidikan Kewarganegaraan (*Civic Education*) sesuai ke dalam muara utama pembelajaran PKn. Dalam tinjauan *Civic Education*, partisipasi warga negara dibentuk oleh elemen-elemen *civic knowledge*, *civic virtue*, *civic skill*, *civic disposition*, dan *civic commitment* (Branson dan

Quigley, 1998). Budimansyah dan Suryadi (2008) juga menyebutkan bahwa paradigma *Civic Education* ala civitas internasional dan sejumlah *center for Civic Education* juga menitikberatkan pada pengembangan *civic virtue* dan *civic culture*. Kebajikan kewarganegaraan atau *civic virtue* di bidang lingkungan yang mengalami kemerosotan moral ditandai dengan semakin meluasnya pengerusakan hutan melalui *illegal logging*, pembuangan sampah dan limbah industri secara sembarangan, penurunan kualitas udara dan air. Kondisi ini membutuhkan alternatif solusi yang mengikutsertakan semua komponen masyarakat. Program-program pro lingkungan oleh komunitas Bandung Berkebun merupakan contoh sederhana bagaimana warga negara semestinya memberikan partisipasinya dalam bentuk kepedulian terhadap lingkungan. Untuk membuat lebih efektif diperlukan kolaborasi antara penggerak kepedulian lingkungan dengan pemilik otoritas atau pemangku kebijakan melalui tindak lanjut gerakan kepedulian lingkungan ke dalam fungsi institusional di bawah pemerintah (Rajkopal, 2013). Kolaborasi tersebut sepenuhnya telah dilaksanakan lewat penyelenggaraan program BKUF antara Bandung Berkebun dengan Pemerintah Kota Bandung.

Kewarganegaraan ekologi dalam program pro lingkungan oleh Bandung Berkebun dijalankan dalam beberapa tahapan. *Pertama*, adanya pemberian pengetahuan kepada anggota dan peserta. Pengetahuan lingkungan atau *environmental knowledge* yaitu ekspresi dari pengalaman dan pengetahuan yang berhubungan dengan interaksi alam serta pemahaman yang dibutuhkan untuk menciptakan dan melakukan perbaikan bagi kelestarian lingkungan, baik secara individu, kelompok atau organisasi (WWF-Malaysia, 2008). Kemelekan ekologi ini dapat dilihat dari pengetahuan peserta program pro lingkungan yang telah mengetahui berbagai varietas tanaman yang sesuai untuk program ini. Warga juga dapat menciptakan kebun-kebun pribadi di kediaman masing-masing sehingga berpotensi mengubah wajah kewilayahannya menjadi lebih hijau. Lautenschlager dan Smith (2007) menjelaskan keberadaan komunitas berkebun memang bermanfaat mendidik warga untuk memiliki pengetahuan lingkungan termasuk pentingnya pengadaan bahan pangan yang sehat dari hasil kebun mereka sendiri *Kedua*, rutinitas kegiatan yang terjadwal secara rutin turut mengembangkan keterampilan warga dalam menjalankan kegiatan pro lingkungan secara mandiri. *Environmental skills*

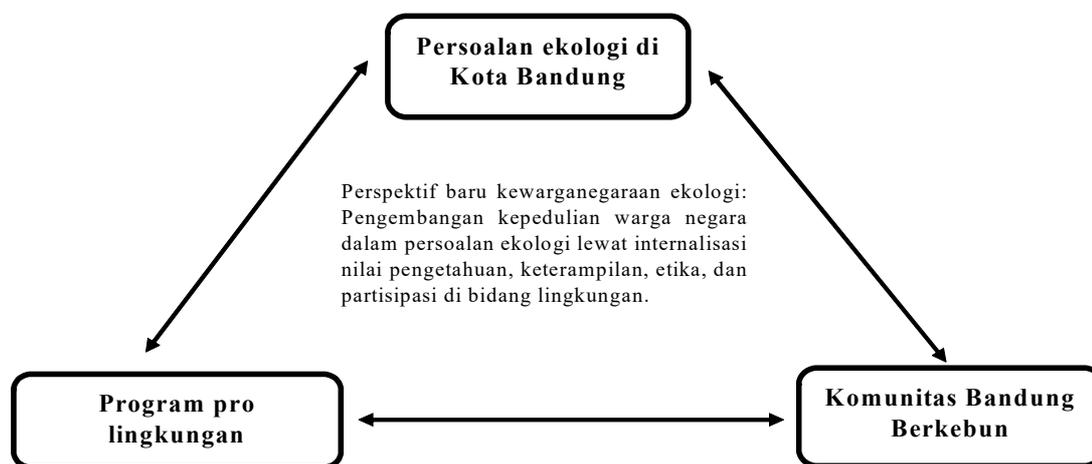
adalah keterampilan yang dibutuhkan untuk mengidentifikasi, mengantisipasi, mencegah, dan mengatasi problem lingkungan, baik secara individu, kelompok, atau organisasi (WWF-Malaysia, 2008). Keterampilan dalam pengelolaan lingkungan nampak dijalankan oleh warga di Kampung Baladewa yang mampu mengidentifikasi persoalan limbah di Sungai Citepus yang menimbulkan polusi udara sehingga kebun-kebun *urban farming* saat ini telah mampu meminimalisasikan dampak buruk dari kondisi tersebut. Problem-problem lingkungan seperti pembuangan sampah sembarangan ke sungai dan keterbatasan lahan dapat diatasi melalui upaya persuasif kepada warga. Tindakan pengerusakan dan pengotoran kondisi sungai tidak lagi terjadi karena warga telah dapat dibina sehingga muncul rasa memiliki yang membuat mereka segan untuk merusak kebun-kebun *urban farming*. Keterbatasan lahan juga tidak lagi menjadi permasalahan sebab warga telah terampil mengupayakan kebun *urban farming* dengan menutup bagian atas Sungai Citepus menggunakan papan kayu dan besi.

Ketiga, pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh menjadi modal pembentukan etika lingkungan. Etika lingkungan (*environmental attitudes*) merupakan seperangkat nilai dan *feelings* terhadap lingkungan, serta motivasi untuk berperan aktif bagi pengembangan ekologi dan proteksinya, baik secara individu, kelompok atau organisasi (WWF-Malaysia, 2008). Nilai motivasi dalam program ini berhasil dilembagakan oleh komunitas Bandung Berkebun melalui program-program unggulannya seperti *urban farming*, *school urban farming*, *street urban farming*, dan *campus urban farming*. Rolston (dalam Sadler-Smith, 2015) mengartikan etika lingkungan sebagai kewajiban manusia untuk menghormati alam, menerima tanggung jawab atas alam melalui optimalisasi peran manusia di bumi. Etika lingkungan adalah kritik terhadap etika manusia yang selama ini hanya terbatas pada komunitas sosial saja. Menurut Keraf (2010), kritik etika lingkungan adalah cara pandang manusia sebagai pusat segala nilai (antroposentrisme) menjadi penyebab berbagai perilaku ketidakberadaban manusia kepada alam. Oleh karena itu, lingkungan perlu dimasukkan ke dalam bagian dari komunitas moral. Persoalan lingkungan di Kota Bandung yang diwacanakan oleh Bandung Berkebun merupakan penerapan isu moral dan perilaku manusia terhadap lingkungan harus ditujukan kepada keyakinan moral dan pemeliharaan kebaikan seseorang serta tanggung jawabnya kepada

lingkungan. Etika lingkungan dalam beragam gerakan pro lingkungan inilah yang kemudian menjadi definisi dari sebuah watak atau karakter utama manusia yang menghargai interaksi dan hubungannya dengan lingkungan (Sandler dalam Sadler-Smith, 2015).

Tahapan *keempat*, warga negara pada akhirnya akan memiliki sensitifitas terhadap persoalan ekologi dan berupaya menerapkan kepedulian lingkungan melalui serangkaian tindakan pro lingkungan. Respon warga negara terhadap persoalan lingkungan akan menghadirkan partisipasi penyelamatan lingkungan (*environmental participation*). Partisipasi atas kondisi lingkungan ini sering diartikan sebagai *environmental participation*, yaitu motivasi dan berbagai tindakan aplikatif (*actions*) di berbagai tingkatan kebijakan untuk menciptakan lingkungan yang berkelanjutan, baik secara individu, kelompok,

atau organisasi (WWF-Malaysia, 2008). Hal ini menjadi upaya penting bagi pengembangan peran aktif warga negara baik secara individu, kelompok dan organisasinya untuk melakukan tindakan proteksi kepada lingkungan. Tindakan pertama yang dapat diperoleh dari etika lingkungan ini adalah keenganan untuk melakukan tindakan pengerusakan dan pengotoran lingkungan. Tindakan ini bisa berupa perilaku membuang sampah di tempatnya, melakukan penghijauan dari lingkungan terkecil yaitu rumah, pembuatan lubang biopori dan sumur resapan sebagai penjagaan cadangan air, dan pengurangan serta pemanfaatan barang daur ulang seperti plastik. Berikut skema pengembangan kepedulian lingkungan melalui program-program pro lingkungan di dalam Bandung Berkebun.



Gambar 1. Skema Pengembangan Kepedulian Lingkungan dalam Berkebun

Pengetahuan, keterampilan, dan etika ditunjukkan dalam partisipasi warga negara berupa aktivitas pro lingkungan adalah perwujudan watak peduli lingkungan. Program-program pro lingkungan dalam Bandung Berkebun terbukti mengembangkan komitmen, kepercayaan diri, dan kompetensi warga negara yang bermuara kepada kebajikan kewarganegaraan (*civic virtue*) yang diaktualisasikan lewat serangkaian upaya menjaga kelestarian ekologi (Winataputra, 2012; Quigley, Buchanan, dan Bahmueller, 1991). Dapat disimpulkan bahwa kebajikan kewarganegaraan diperoleh karena program ini membangun intelektualitas, keterampilan, dan kecerdasan afektif pegiatnya lewat partisipasi pelestarian lingkungan.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Komunitas Bandung Berkebun hadir sebagai respon warga negara terhadap persoalan ekologi di Kota Bandung. Komunitas ini menerapkan beberapa program pro lingkungan yaitu *urban farming*, *school urban farming*, *street urban farming*, dan *campus urban farming* dengan tujuan mengajak warga Kota Bandung guna menerapkan kepedulian ekologi lewat aktivitas berkebun di tengah kota (*urban agriculture*). Program-program tersebut telah berhasil mengembangkan kepedulian warga negara terhadap krisis ekologi di wilayahnya

sekaligus menjadi penerapan pendidikan karakter peduli lingkungan melalui pemberian bekal pengetahuan dan keterampilan kepada masyarakat sehingga meningkatkan kecerdasan ekologisnya. Kedua kompetensi warga negara tersebut kemudian membentuk etika peduli lingkungan yang selanjutnya membantu warga negara dalam mengupayakan tindakan partisipatif untuk menghidupkan lingkungannya. Kepedulian yang telah terbentuk mencerminkan keberhasilan pengembangan kebijakan kewarganegaraan (*civic virtue*) yang menjadi muara dari pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) di masyarakat. Upaya tersebut mulai mengarah pada sektor pendidikan formal dalam bentuk *school urban farming* dan *campus urban farming* yang sekaligus menjadi model alternatif pendidikan lingkungan hidup.

Saran

Pertama, kepada masyarakat Kota Bandung agar terus berkontribusi bersama Bandung Berkebun dan Pemerintah Kota Bandung dengan menjadi pegiat di setiap wilayah. Hal tersebut demi mencapai manfaat yang lebih luas bagi masyarakat. *Kedua*, penelitian pada topik ini masih terbuka untuk dikembangkan pada masa yang akan datang dengan mengambil salah satu fokus persoalan yang dapat dikaji sesuai dengan disiplin keilmuan yang digeluti. Karena pembentukan komunitas berkebun dan pelaksanaan berbagai programnya terus mendapat tantangan berbeda guna mengurangi ketergantungan penduduk perkotaan terhadap pasokan bahan pangan dari wilayah-wilayah pinggiran.

DAFTAR RUKUN

- Amirtahmasebi, R. 2008. *Food urbanism: Urban agriculture as a strategy to facilitate social mobility in informal settlement*. Tesis tidak diterbitkan. Massachusetts: Massachusetts Institute of Technology.
- Bandung Berkebun. 2014. *Frequently asked question BdgBerkebun* (FAQ). Bandung: Dokumen tidak diterbitkan.
- Barthel, S., Parker, J. dan Ernstson, H. 2015. Food and green space in cities: A resilience lens on gardens and urban environmental movements. *Urban Studies*, 52 (7):1321—1338.
- Branson, M. S. dan Quigley, C. N. 1998. *The role of civic education*. Washinton: Center for Civic Education.
- Budimansyah, D. 2015. *Fundamental sociological symptoms as a source of occurrence of turbulence in Indonesian society during the post-reform*. Makalah disajikan dalam *1st UPI International Conference on Sociology Education*, Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung, 12 Oktober 2015.
- Budimansyah, D. & Suryadi, K. 2008. *PKn dan masyarakat multikultural*. Bandung: Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan.
- Certoma, C. & Notteboom, B. 2015. Informal planning in a transactive governmentality: Re-reading planning practices through Ghent's community gardens. *Planning Theory*:1—24.
- Dobson, A. Tanpa Tahun. *Ecological citizenship: A disruptive influence?*, (Online), (<http://www.vedegylet.hu/okopolitika/Dobson%20-%20Ecological%20Citizenship.pdf>), diakses 25 September 2015.
- Dobson, A. 2007. Environmental citizenship: towards sustainable development. *Sustainable Development*, 15:276—285.
- Downtown, P. F. 2002. *Ecopolis: Architecture and cities for a changing climate*. Collingwood: CSIRO Publishing.
- Escruihuela, C. M. 2008. Promoting ecological citizenship: Rights, duties and political agency. *ACME: An International E-Journal for Critical Geographies*, 7 (2):113—134.
- Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO). 2014. *Growing greener cities in Latin America and the Caribbean*. Roma: FAO.
- Indonesia Berkebun. 2015. *Urban farming ala indonesia berkebun*. Jakarta: PT Agro Media Pustaka.
- Keraf, A. S. 2010. *Etika lingkungan hidup*. Jakarta: Kompas.
- Knapp, L. 2013. *Implementing urban agriculture in Europe: A case study of urban agriculture projects in the Netherlands and Switzerland*. Tesis tidak diterbitkan. Wageningen: Wageningen University and Research Centre.
- Lautenschlager, L., dan Smith, C. 2007. Beliefs, knowledge, and values held by inner-city youth about gardening, nutrition, and cooking. *Agriculture and Human Values*, 24:245—258.
- Loram, A., dkk. 2011. Urban domestic gardens: The effects of human interventions on garden composition. *Environmental Management*, 48:808—824.
- McCarney, P. L. 2012. City indicators on climate change implications for governance. *Environment and Urbanization ASIA*, 3 (1):1—39.
- Miles, M. B., dan Huberman, A. M. 2012. *Analisis data kualitatif: Buku sumber tentang metode-metode baru*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.

- Nagra, V. 2010. Environmental education awareness among school teachers. *Environmentalist*, 30:153—162.
- Pemerintah Daerah Kota Bandung. Tanpa tahun. *Rancangan pembangunan daerah jangka menengah 2014-2018*. Bandung: Pemerintah Daerah Kota Bandung.
- Quigley, C. N., Buchanan, Jr. J. H., dan Bahmueller, C. F. 1991. *Civitas: A framework for civic education*. Calabas: Center for Civic Education.
- Rajkopal, P. 2013. Ecological modernisation and citizen engagement. *International Journal of Sociology and Social Policy*, 34 (5/6):302—316.
- Saiz, A. V. 2005. Globalisation, cosmopolitanism and ecological citizenship. *Environmental Politics*, 14 (2):163—178.
- Sadler-Smith, E. 2015. Communicating climate change risk and enabling pro-environmental behavioral change through human resource development, *Advances in Developing Human Resources*, 17 (4):442—459.
- Samong, F., Suryadi, A. & Budimansyah, D. 2015. *The development of character education in primary schools through the enhancement of school culture*. Makalah disajikan dalam *1st UPI International Conference on Sociology Education*, Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung, 12 Oktober 2015.
- Setiawan, B. dan Dwita H. R. 2004. *Ketahanan pangan, lapangan kerja, dan keberlanjutan kota: Studi pertanian kota di enam kota Indonesia*. Yogyakarta: Pusat Studi Lingkungan Hidup UGM.
- Specht, K., dkk. 2014. Urban agriculture of the future: an overview of sustainability aspects of food production in and on buildings. *Agric Hum Values*, 31:33—51.
- Spiker, M.L., dan Poulsen, M. N. 2014. *Integrating urban farms into the social landscape of cities*. Baltimore: Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health.
- SPUR. 2012. *Public harvest, expanding the use of public land for urban agriculture in San Francisco*. San Francisco: SPUR.
- Sudarmadi, S., dkk. 2001. A survey of perception, knowledge, awareness, and attitude in regard to environmental problems in a sample of two different social groups in Jakarta Indonesia. *Journal of Environment, Development and Sustainability*, Kluwer Academic Publishers, 3:169—183.
- Sulastri, B.D. & Sopandi, W. 2015. *Implementing value clarification technique to improve environmental awareness among pre-service chemistry teacher*. Makalah disajikan dalam *1st UPI International Conference on Sociology Education*, Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung, 12 Oktober 2015.
- Turner, B.S. 2001. The erosion of citizenship. *British Journal of Sociology*, 52:189—209.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH). Sekretariat Negara: Jakarta.
- Widyawati, N. 2013. *Urban Farming: Gaya Bertani Spesifik Kota*. Yogyakarta: ANDI OFFSET.
- Winataputra, U.S. 2012. *Pendidikan kewarganegaraan dalam perspektif pendidikan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa: gagasan, instrumentasi, dan praksis*. Bandung: Widya Aksara Press.
- World Wide Fund and Nature (WWF) Malaysia. 2008. *Environmental citizenship: Emerging perspectives in Malaysia*, (Online), (http://awsassets.wwf.org.my/downloads/environmental_citizenship_study_report_170510.pdf, diakses 25 September 2015).